**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) DI DESA BUNGKANG KECAMATAN SEKAYAM
KABUPATEN SANGGAU**

Oleh

APRIYANTO KAREN^{1*}

NIM. E1011161044

Dr. Sri Maryuni M.Si², H. Joko Triyono M.Si²

*Email: karenapriyanto@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penulisan Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bungkang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh pada proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu, mengidentifikasi permasalahan, potensi dan peluang, membuat rencana kegiatan, memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif. Tetapi dalam penerapan rencana kegiatan kelompok masih belum baik hal ini karena hanya satu saja program unit usaha yang terealisasi yaitu depot air minum dari lima rancangan unit usaha. Saran untuk kedepannya, Masyarakat diberikan sosialisasi dan diberikan penjelasan mengenai BUMDes, dalam hal manajerial tugas pokok dan fungsi harus ditelaah dengan baik dan benar sehingga pada saat implementasi tidak salah arah dan bisa mengembangkan unit-unit usaha.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Partisipatif

PONTIANAK

**COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH: VILLAGE-OWNED
ENTERPRISES IN BUNGKANG VILLAGE, SEKAYAM SUB-DISTRICT,
SANGGAU REGENCY**

By :

1. APRIYANTO KAREN^{1*}

NIM. E1011161044

Dr. Sri Maryuni M.Si², H. Joko Triyono M.Si²

*Email: karenapriyanto@gmail.com

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

Abstract

This research aims to provide an understanding of community empowerment through: Village-Owned Enterprises in Bungkang Village, Sekayam Sub-District, Sanggau Regency. The type of research is descriptive research with qualitative approach. This research uses data collection methods through interviews and observation. The results obtained in the process of community empowerment through Village-Owned Enterprises consists of identifying problems, potential and opportunities, planning activities, monitoring the process and results of activities continuously in a participatory manner. However, the implementation of group activity plans this is still not good because only one business unit program has been realized, namely drinking water depot out of five business unit designs. It is suggested that the community should be socialized and explained of Village-Owned Enterprises in terms of managerial main tasks and functions which must be studied properly and correctly so that at the time of implementation it is not misdirected and able to develop business units.

Keywords: Empowerment, Community, Village-Owned Enterprises, Participative

A. Pendahuluan

Saat ini pemerintah tengah gencar untuk membangun perekonomian nasional. Untuk pembangunan perekonomian kini difokuskan langsung pada daerah dan sasaran utamanya adalah di desa. Hal ini dikarenakan masih banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dimana penduduk miskin lebih banyak di daerah desa daripada di kota. Oleh sebab itu dengan penanganan yang serius terkait kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka memungkinkan sekali jika desa juga akan semakin terus berkembang.

Pemerintah terus berupaya membangun perekonomian di desa-desa. Karena desa adalah sebuah ujung tombak yang harus benar-benar difokuskan dalam pembangunan. Tidak dipungkiri jika desa masih sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kota apalagi desa yang berada di pelosok. Hal ini dikarenakan masih sulitnya akses informasi, sarana dan prasarana, dll. Begitupun dari segi perekonomian yang kalah jika dibandingkan dengan

perekonomian di kota. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan yang merata oleh pemerintah agar kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat desa utamanya. Namun pembangunan desa terkadang tidak tepat sasaran karena disebabkan campur tangan pemerintah yang masih sangat besar.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Untuk saat ini BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan

melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi dipedesaan.

Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Dari Undang Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya. Keberadaan BUMDes ini diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut maka desa akan menjadi mandiri dalam tumbuh dan berkembang. Kemandirian inilah yang akan membuat desa dengan mudah mengembangkan potensi secara maksimal. Karena masing-masing desa akan mudah mengetahui kelemahan dan potensi desa yang sebenarnya, dari situlah desa akan lebih mengenali apa yang dibutuhkan dan mana yang harus dikelola secara tepat. Untuk lebih lanjut potensi tersebut dikembangkan melalui lembaga ekonomi yang ada di desa dan salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Menurut Totok Mardikanto (2019:125-126) hakikat pemberdayaan masyarakat

adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Bungkok, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Sekayam yang melaksanakan kegiatan BUMDes diantara 11 Desa lainnya di Kecamatan Sekayam. Desa Bungkok memiliki luas 79,98 Km² dan jumlah penduduknya sebanyak 3001 jiwa. BUMDes Bungkok Mulai dibentuk tahun 2017 dan terealisasi pada tahun 2018. Salah satu program yang terealisasi ialah depot air minum.

Tabel 1.1

Anggaran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2018 Desa Bungkok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

No	Program	Tahun Anggaran	Anggaran
1	Depot Air Minum	2017	Rp. 94.000.000
2	Jumlah		Rp. 94.000.00

Sumber : Laporan Anggaran

BUMDes Desa Bungkok Tahun 2018

Tabel 1.2

Anggaran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2019 Desa Bungkok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

No	Program	Tahun Anggaran	Anggaran
1	Depot Air Minum	2018	Rp. 47.000.000
2	Jumlah		Rp. 47.000.000

Sumber : Laporan Anggran BUMDes Desa Bungkok Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwa BUMDes desa Bungkok mengalami penurunan anggaran semua ini dikarenakan hanya satu program saja yang terealisasi yaitu depot air minum dan juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya

sedikit keuntungan yang diterima, hal ini menyebabkan diturukannya anggaran BUMDes tersebut.

Program BUMDes Bungbang ada beberapa program seperti Depot air minum, Bengkel Las, Simpan pinjam, Toko alat pertanian, Toko sembako. Program tersebut yang terealisasi hanya depot air minum. Berbeda halnya dengan bengkel las yang belum terealisasi karena tempat untuk membuka bengkel las yang belum ada dan alat yang digunakan belum tersedia juga. Program simpan pinjam yang awalnya bertujuan untuk memberi modal kepada masyarakat untuk membuka usaha tapi pada kenyataannya belum bisa terealisasi karena semua anggaran untuk depot air minum. Toko alat pertanian bertujuan untuk memudahkan petani untuk membeli alat-alat pertanian dan juga pupuk supaya petani tidak harus jauh pergi ke kota kecamatan untuk mencarinya tapi pada kenyataannya program ini belum bisa terealisasi karena hambatan modal usaha juga sehingga kegiatan ini ditunda untuk sementara waktu.

Hal ini juga terjadi pada program toko sembako, tujuan awal dibuatkannya program toko sembako ini agar masyarakat tidak perlu susah untuk belanja ke Ibukota Kecamatan untuk berbelanja sembako tapi pada penerapannya belum bisa juga terealisasi.

Pada kenyataannya kondisi pengelolaan BUMDes di Desa Bungbang masih kurang efektif, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pengelola dan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui transparansi pengelolaan BUMDes tersebut, dalam menyampaikan suatu program tidak di perlihatkan secara umum dan hanya segelintir orang yang tau akan program dan pelaksanaan dari BUMDes tersebut seperti dalam menyampaikan program kegiatan pemberdayaan dan anggaran yang ada di BUMDes tersebut tidak di sosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan pemikiran negatif masyarakat Desa kepada pengurus BUMDes tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Masyarakat belum bisa diberdayakan Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk memilih judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.”**

B. Kajian Pustaka

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil.

Sondang P. Siagian, (dalam Sahya Anggara dan Sumantri 2016:24), “administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata

kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapain tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Masyarakat berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dengan cara yang telah disepakati dan juga telah ditentukan arah dan tujuan apa yang akan dicapai. Akan halnya dengan kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia Wrihatnolo dan Dwijiwinoto dalam Mardikanto (2019:10) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Strategi pertumbuhan
- 2) Pertumbuhan dan distribusi
- 3) Teknologi tepat-guna
- 4) Kebutuhan dasar
- 5) Pembangunan berkelanjutan
- 6) Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat

Tim Deliveri 2004 (dalam Totok Mardikanto 2019:76), Menegaskan bahwa Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan

mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.

Proses tersebut menepatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Sumaryadi (2005:11), pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam susasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat

menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang ini tidak mampu melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Proses Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dana tau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan . sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan , untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dana tau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukanguna memperbaiki mutu hidupnya

Totok Mardikanto (2019:125-126) hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses pemberdayaan

tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Proses ini meliputi :

- a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan-awal dan teknis penyelesaiannya;
- b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan;
- c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan;

- d) Pembahasan hasil penyusunan rencana tindak lanjut.
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi;
- Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah;
  - Identifikasi alternatif pemecahan masalah terbaik;
  - Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah;
  - Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok : rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitas dari pendamping selanjutnya diimplemntasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan;
4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan bila diperlukan.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Berdasarkan pendapat tersebut dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menggambarkan kondisi objek secara alamiah menyangkut proses pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bunggang

Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah : Kepala Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Sekretaris Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Kepala Dusun di Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Direktur utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Dua (2) Masyarakat Desa Bunggang.

Objek penelitian adalah apa yang diteliti. Adapun objek

penelitiannya yaitu sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bungbang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi Teknik observasi adalah teknik pengambilan data yang sistematis dan teliti dalam mencari jawaban suatu masalah yaitu dengan jalan mengamati dan meneliti secara langsung pada objek penelitian.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai Teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pada pihak pihak

tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian

C. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi ialah pengumpulan dokumen-dokumen terkait yang dapat mendukung peneliti untuk menjawab rumusan masalah.

5. Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai Teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pada pihak pihak tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dibantu dengan alat instrumen yang lain. Untuk wawancara perlu pedoman

wawancara, tape rekorder, maupun buku catatan. Untuk dokumentasi yaitu berupa alat pencatat dan fotocopy. Untuk observasi alat bantu yang digunakan adalah alat catat dan kamera.

6. Teknik Analisa Data

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Karena data yang penulis kumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sangat beragam (tidak semua relevan). Oleh sebab itu penulis perlu melakukan analisis data data melalui reduksi data. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki relevansi dengan masalah penelitian, data tersebut kemudian dirangkum dan disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam proses analisis selanjutnya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah Selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam Bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Data display yang penulis lakukan yaitu melakukan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang ditampilkan dalam bentuk tabel, bagan dan sejenisnya, kemudian selanjutnya data disajikan atau diuraikan dalam bentuk teks naratif agar lebih mudah dipahami.

c. *Conclusion* verifikasi

(penarikan kesimpulan dan verifikasi) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi perlu dilakukan agar data yang akan disimpulkan semakin mantap, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Teknik Keabsahan Data

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dimaksudkan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara yang telah di peroleh melalui beberapa sumber

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. misalnya penulis memperoleh data dengan teknik wawancara, lalu dicek dengan teknik observasi, dan dokumentasi

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat menjadi suatu proses yang perlu dilakukan agar masyarakat dapat mandiri dan dapat bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanatkan, tujuannya agar bisa menopang ekonomi

masyarakat dan memberikan masukan kepada pendapatan asli desa. Menurut Totok Mardikanto (2019:125-126) Didalam proses pemberdayaan tersebut masyarakat dan pemerintah desa sama-sama mengkaji dan menggali potensi apa yang ada di desa tersebut.

a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.

Pada tahun 2017 Pemerintah desa Bungking melakukan pertemuan untuk membentuk suatu badan usaha yang menopang ekonomi desa yang mana dinamakan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes ini terbentuk dari hasil musyawarah Pemerintah desa dengan masyarakat desa. Pemerintah desa sudah merencanakan kegiatan pertemuan awal dengan masyarakat desa tersebut dan setelah terbentuk BUMDes,

Pemerintah desa dan BUMDes mengadakan pertemuan untuk mengkaji potensi yang ada di desa. Ada beberapa potensi yang ada di desa Bungking, Seperti :

1. Sumber daya air yang sangat berlimpah dan abanyaknya riam
  2. Hutan hutan tropis yang menyimpan banyak keanekaragaman hayati
  3. Daerah yang berdekatan dengan ibu kota kecamatan maupun ke negara Malaysia
  4. Sawah, ladang dan perkebunan luas.
  5. Komposisi penduduk yang beraneka ragam.
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian.

Dalam menyusun rencana kegiatan kelompok hal pertama yang harus dianalisis adalah permasalahan-permasalahan yang akan timbul nantinya, ada beberapa permasalahan yang

menjadi fokus untuk diminimalisir nantinya yaitu kurangnya manjerial dan masalah penyertaan modal untuk berdirinya BUMDes tersebut. Untuk modal awal dari BUMDes alternative rencana dari pemerintahan desa ialah akan mengadakan penyertaan modal bagi BUMDes tersebut. Desa Bungking memiliki sumber daya yang berlimpah baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam meliputi berlimpahnya pasokan air dan banyaknya riam, hutan hujan tropis, memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas, sedangkan Sumber daya manusianya memiliki banyak budaya dan jumlah penduduknya yang relative banyak. Rencana BUMDes mengadakan program unit usaha dengan tujuan untuk emnopang ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat, dalam hal ini BUMDes Pribumi

Sejahtera berencana untuk mengadakan unit unit usaha yang berupa;

1. Depot air minum
2. Bengkel las
3. Simpan pinjam
4. Toko sembako
5. Dan toko alat pertanian.

c. Menerapkan Rencana Kegiatan Kelompok

Ada berbagai program perencanaan yang direncanakan oleh BUMDes Pribumi Sejahtera untuk menopang ekonomi dan menjalankan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan merencanakan unit usaha berupa Depot air minum, bengkel las, simpan pinjam, toko sembako dan toko alat pertanian. Dari kelima rencana tersebut yang terealisasi hanyalah depot air minum, hal ini dikarenakan di desa bungkok saat itu belum ada orang yang menjual air dan juga sumber daya air yang sangat berlimpah di desa bungkok itu sendiri.

Pemerintah desa mengucurkan dana untuk membangun Kantor BUMDes tersebut dan juga empat untuk depot air minum. Depot air minum di tangani oleh maskur.

- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*).

Pemantauan Proses dari kegiatan Depot air minum dan pemantauan kegiatan BUMDes lainnya dilakukan oleh dewan pengawas dan juga oleh pemerintah desa, pemerintah desa melihat BUMDes saat ini tidak bisa untuk menopang ekonomi desa dan juga adanya anggota yang tidak aktif juga membuat BUMDes tidak bekerja secara optimal dikarenakan sebagian besar pengurus BUMDes adalah seorang petani dan pekebun mereka susah untuk berbagi waktu antara pekerjaan di kebun dan sebagai seorang pengurus

BUMDes. Hal ini membuat Pemerintah desa untuk melakukan penyegaran terhadap BUMDes tersebut agar bisa bermanfaat kedepannya dan bisa menopang ekonomi desa serta berkontribusi dalam pemasukan pendapatan asli desa.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang proses Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bunggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses pemberdayaan yang pertama ini ini dapat dilihat dengan Pemerintah Desa telah melaksanakan pertemuan dengan masyarakat untuk membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Kemudian Pemerintah beserta

Pengurus BUMDes bersama-sama mengkaji potensi wilayah yang ada Di Desa Bunggang tersebut. Potensi yang ada di desa bunggang kecamatan sekayam seperti melimpahnya jumlah air bersih, daerahnya di area pengunungan, lahan nya luas, lahan pertanian, perkebunan dan persawahan yang luas serta penduduk yang banyak.

2. Pada tahapan kedua ini BUMDes sudah memiliki rencana dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dengan membuat unit unit usaha yang dinilai dapat mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Unit-unit usaha yang dimaksud adalah : Depot air minum, Bengkel las, Simpan Pinjam, Toko Sembako dan Toko alat pertanian.
3. Pengurus BUMDes Pribumi Sejahtera telah merealisasi salah satu unit usaha yaitu unit usaha depot air minum dikarenakan potensi sumber

daya air bersih desa bungking sangat berlimpah. Tapi dalam tahapan ini pengurus BUMDes tidak bisa merealisasikan 4 rancangan unit usaha yang lainnya.

mendasari asas menderikan BUMDes tersebut. BUMDes seharusnya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bisa memberdayakan masyarakat.

4. Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bungking untuk mengevaluasi BUMDes dikarenakan pemerintah desa cepat bertindak agar BUMDes ini tetap hidup dimana langkah yang diambil pemerintah desa ini ialah dengan melakukan penyegaran pengurus baru.

2. Pemerintah desa, BUMDes dan masyarakat harus lebih banyak bersosialisasi agar mengetahui apa-apa potensi yang dimiliki oleh desa tersebut sehingga semua potensi desa dapat dioptimalkan dengan baik.

3. Perbaiki diManajemennya yang mana tugas pokok dan fungsi harus ditelaah dengan baik dan benar sehingga pada saat implementasi tidak salah arah dan bisa mengembangkan unit-unit usaha.

2. Saran

Saran peneliti untuk Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bungking Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau adalah :

1. Masyarakat diberikan sosialisasi dan diberikan pengertian atau pun penjelasan mengenai BUMDes apa yang

4. Pemerintah Desa dan Badan pegawai BUMDes harus bisa mendampingi BUMDes secara langsung agar BUMDes tidak kehilangan arah dan tujuannya. Hal ini

dimaksudkan agar BUMDes tidak hanya sebuah nama saja tapi unit-unit usahanya berjalan dan bisa menopang ekonomi desa dan turut memberdayakan masyarakat.

Subejo. 2013. *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Bunga Rampai*. Jakarta:Universitas Indonesia Press.

Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.

F. Daftar Pustaka

Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta: Bandung.

Anggara, Sahya dan Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktik*. Pustaka Setia: Bandung.

Kartasasmita, G.1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDE.

Mardikanto, Totok. dan Soebianto, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. ALFABETA. Bandung.

Ngusmanto, H. 2015. *Pemikiran & Praktik Administrasi Pembangunan*. Wacana Media. Jakarta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&G*. Alfabeta: Bandung.

SUMBER LAIN :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

Profil Desa Bungkok Tahun 2019